



Media: Harian Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 09 Maret 2021

Halaman: 5

► PENYAMPAIAN ASPIRASI

Hendak Unjuk Rasa, Massa FPR Diadang Warga

DANUREJAN—Aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan Aliansi Front Perjuangan Rakyat (FPR) Jogja di depan Kantor Gubernur DIY, Kota Jogja, Senin (8/3) diwarnai keributan. Salah satu peserta dikeroyok oleh sekelompok orang yang diketahui merupakan warga setempat.

Pengeroyokan terjadi saat massa aksi yang datang dari arah timur sampai di depan Kantor Gubernur DIY sekitar pukul 14.40 WIB. Tiba-tiba dari arah berlawanan sekelompok pria menghampiri peserta dan meneriakinya untuk pulang.

Beberapa pria menendang motor yang dibawa peserta. Salah satu pria dari kelompok pengadang bahkan memukulkan helm ke seorang peserta. Situasi kian panas ketika seorang peserta dikeroyok oleh beberapa orang dari kelompok tersebut. "Tiba-tiba saja tadi dipukul ramai-ramai sama mereka, kira-kira tiga sampai lima orang," kata Arif, 20, peserta demo yang menjadi korban pemukulan, Senin. Beruntung Arif berhasil lolos meski harus menerima sejumlah pukulan di kepalanya.

Seusai insiden itu, jajaran kepolisian dan satuan Polisi Pamong Praja yang berjaga di lokasi berupaya mempertemukan kelompok pengadang dan peserta unjuk rasa. Mediasi berhasil dilakukan meski berjalan alot dan sempat terjadi keributan kecil. "Tadi warga menolak itu karena menimbulkan kerumunan. Tapi akhirnya sudah damai dan warga menyepakati boleh ada, tetapi pelaksanaannya dibatasi 10 orang dan menyesuaikan protokol kesehatan," terang Kasi Pengendalian dan Operasional Satpol PP DIY, Edhy Hartana. Salah satu warga yang turut mengadang peserta unjuk rasa, Heru, mengatakan warga menolak adanya kegiatan tersebut karena dikhawatirkan bisa mengganggu wisatawan. "Kami tidak mau ada demo, kalau ada demo wisatawan jadi takut," ujarnya.

Dari pantauan *Harian Jogja*, penyampaian aspirasi itu akhirnya bisa dilakukan. Adapun Aliansi FPR Yogyakarta yang terdiri dari sejumlah organisasi seperti Front Mahasiswa Nasional (FMN), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) hingga Seruni itu menyerukan agar para perempuan bangkit untuk melawan pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang dianggap antirakyat dan demokrasi.

FPR juga menyampaikan 20 tuntutan kepada pemerintah, di antaranya penghentian perampasan dan monopoli tanah; penghentian diskriminasi upah pada buruh dan buruh tani perempuan; memberikan jaminan perlindungan terhadap perempuan Indonesia dari segala bentuk kekerasan; penghentian liberalisasi di sektor kesehatan hingga pencabutan Pergub DIY No.1/2021 tentang Tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka. (*Jalu Rahman Dewantara*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			

Yogyakarta, 07 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005